













yang terjadi adalah suami telah mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Konflik internal rumah tangga yang terkait dengan persoalan hak dan kewajiban suami isteri termasuk didalamnya hak dan kewajiban terkait ekonomi seringkali membuat salah satu pihak yang dalam hal ini adalah isteri memiliki pilihan sulit. Pilihan sulit ini adalah untuk tetap bertahan didalam rumah tangga tersebut atau pilihan lainnya untuk berpisah dengan cara bercerai dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama demi menuntut haknya yang telah terabaikan. Indonesia dalam hal ini melalui Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 5 telah menjamin hak kedua pasangan baik itu suami maupun isteri. Didalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa *“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”*.

Dalam hal ini ada banyak kasus dimana salah satu pasangan baik isteri maupun suami ini mengajukan gugatan kompensasi materiil terhadap kelalaian kewajiban salah satu pasangan. Beberapa gugatan didasarkan kepada lalainya salah satu pasangan dalam menunaikan kewajiban yang terkait dengan nafkah lahir atau nafkah yang berbentuk materiil. Akan tetapi ada juga beberapa gugatan yang menuntut kompensasi materiil atas kelalaian salah satu pasangan dalam hal ini biasanya adalah pihak suami atas nafkah batin atau nafkah yang berbentuk moril.

Diantara kasus-kasus tersebut ada yang menarik yaitu kasus di Bondowoso. Dalam kasus ini dijelaskan ada seorang istri yang dalam hal ini adalah Penggugat mengajukan cerai gugat kepada suami yang dalam hal ini

adalah Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2014 di Pengadilan Agama Bondowoso. Hal ini dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Salah satu alasan Penggugat melakukan gugatan adalah dikarenakan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat serta tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat yakni hubungan layaknya suami isteri, ternyata tidak melakukannya kewajiban tersebut Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Dwi Sofiana, dan sekarang Tergugat dengan perempuan tersebut telah satu rumah bahkan telah seperti layaknya suami isteri, menurut informasi dari karyawan Tergugat bahwa Tergugat telah nikah *sirri* dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.

Padaحال Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama sepuluh tahun dan dikaruniai lima orang anak yang masing-masing berumur 12, 9, 8, 5 dan 2 tahun. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun tujuh bulan terhitung sejak bulan Mei 2013. Dalam gugatannya tersebut Penggugat menuntut nafkah *Mādhīyah* sebesar Rp. 50.000,- per hari sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan Penggugat meminta nafkah lima anak kepada tergugat masing-masing sebesar Rp. 500.000,- perbulan sehingga berjumlah Rp.2.500.000,. Tidak hanya itu Penggugat dalam gugatannya mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin pada Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, maka Penggugat





terdapat beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan kompensasi materiil atas nafkah batin, di antaranya:

1. Skripsi tahun 2002 yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Tentang Kompensasi Materiil Atas Nafkah Batin” Milik Ahmad Hamdi Mulyo Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah. Bahasan utama dalam skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan terhadap kompensasi nafkah batin dan penentuan harga nafkah batin. Diketahui bahwa skripsi ini menggunakan metode literatur. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa isteri dapat mengajukan gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin dengan dua cara. Pertama adalah isteri mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang tertuang pada pasal 9 huruf (b) atau (c) PP No. 1 tahun 1975 sekaligus menuntut kompensasi atas nafkah yang tidak diterimanya. Kedua, isteri mengajukan kompensasi atas nafkah batin sebagai gugatan pokok. Gugatan ini dapat dikabulkan, karena untuk menolak gugatan tersebut hakim tidak mempunyai alasan yang kuat.
2. Skripsi oleh Ana Nurul Hidayati tahun 2006 yang berjudul “Putusan PA Bojonegoro Nomor :823/Pdt.G/2001/PA.Bjn. Tentang Tuntutan Isteri Mengenai Ganti Rugi Untuk Nafkah Batin Dalam Perspektif Imam Malik”. Skripsi ini merupakan hasil dari studi lapangan dan literatur terhadap perspektif Imam Malik, tentang tuntutan Isteri mengenai ganti rugi nafkah batin yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro. Yang menjadi dasar dalam pengkabulan hakim disini adalah

bahwa nafkah batin adalah kewajiban suami kepada isteri. Isteri tentu akan dirugikan jika haknya tidak dipenuhi oleh suaminya. Namun hal tersebut ternyata bertentangan dengan pendapat Imam Malik yang juga didukung oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat tersebut adalah jika si suami tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka isteri hanya diberikan dua pilihan yaitu antara cerai gugat atau bertahan melanjutkan rumah tangganya. Dan tidak ada sama sekali keterangan tentang hak isteri untuk menuntut ganti rugi nafkah batin.

3. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Thobib Dzikrul Hasan pada tahun 2011 dengan judul "Gugatan Rekompensi Mengenai Tuntutan Nafkah Batin Isteri Kepada Suaminya Pada Masa Berpisah (*madliyah*) Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA. Lumajang Nomor: 1715/Pdt.G/2006/PA.Lmj)". Bahasan utama dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gugatan rekompensasi mengenai tuntutan nafkah batin kepada suaminya pada masa berpisah (*madliyah*). Dalam perkara ini Hakim Pengadilan Agama Lumajang menolak gugatan tersebut. Adapun alasan hakim dalam penolakan ini adalah tidak ditemukan dasar hukum yang kuat untuk dijadikan rujukan hakim dalam menyelesaikan perkara kaitanya dengan kompensasi nafkah batin isteri dalam bentuk materiil.

Walaupun banyak penelitian terdahulu yang terkait dengan nafkah batin, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang lain. Adapun perbedaannya adalah:













Bab kesatu: Merupakan pendahuluan, membahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Merupakan bab yang bersifat kerangka konseptual, berupa tinjauan umum mengenai penjabaran disiplin keilmuan terhadap penelitian. Yakni mengenai pengertian hak dan kewajiban suami isteri, hak suami atas isteri, hak isteri atas suami, hak dan kewajiban bersama suami dan isteri, serta pembahasan lain yang berkaitan dengan judul.

Bab ketiga: Merupakan bab yang menguraikan data hasil penelitian, yakni data dari Pengadilan Agama Bondowoso terkait penolakan hakim tentang gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin dalam perkara cerai gugat nomor : 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw dan dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bondowoso mengenai perkara tersebut.

Bab keempat: Merupakan bab yang membahas analisis data. Dalam bab ini membahas tentang dasar hukum penolakan hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin yang diajukan oleh pihak isteri kepada pihak suami dalam perkara nomor: 1869/Pdt.G/2014/PA/Bdw

Bab kelima: Merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.